

ETIKA, TANGGUNG JAWAB SOSIAL, GENDER, ISLAM : KESEIMBANGAN DI INDONESIA

Oleh :
Bambang Karnain *

ABSTRACT

Global competition is causing increasingly blurred boundaries between countries, so this makes changing international environment. In order to face the changing international environment it is necessary to change this state of readiness, the preparation of human resources, improving the knowledge and ability of its citizens. Equality of opportunity and opportunity in all areas including resources, education, welfare, justice also is problematic that facing the government. To prevent corruption implementation of Good Governance, Corporate Social Responsibility (CSR) and also Social Responsibility Investment (SRI), the bureaucracy should be more accountability. Impact of corruption is meyengsarakan (read: impoverished) people. In the end, poverty will inevitably have an impact on the quality of human resources, increasing unemployment and the rise of crime.

Keywords: Equality, Good Governance, CSR, SRI, Accountability, Poverty

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan yang melanda daerah pelosok pedesaan, terutama daerah pinggiran kota menjadikan ketidak seimbangan sosial di daerah tersebut yang mengakibatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu semakin rendah. Rasa kebersamaan rendah, rasa gotong royong rendah, rasa menjadi satu bagian bangsa semakin rendah, dan hal ini sangat kita rasakan pada awal jatuhnya orde lama. Budaya tinggi yang dipunyai oleh bangsa yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia makin lama semakin menurun, budaya rasa malu jika berbuat kesalahan, rasa malu jika menjadi orang yang tidak memiliki budi pekerti yang baik dan luhur, selalu menanamkan budaya untuk kegunaan anak cucu sudah semakin berkurang. Kesungguhan wakil rakyat "belum" dapat diandalkan sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan rakyat miskin, wakil rakyat banyak yang korup, tidak mempunyai kinerja "jempolan", politik "dagang sapi" dilaksanakan baik untuk partai yang pro dan kontra, yang pada akhirnya berujung pada kepentingan bersama, saling melindungi dan "kerja-sama" dalam aktivitas yang kurang baik juga tidak terpuji. Dalam kondisi yang demikian itu serta kondisi wakil rakyat yang

* Bambang Karnain adalah dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya

semakin tidak "elok" maka fungsi yang harus mereka lakukan yaitu fungsi pengendalian semakin tidak berjalan dengan baik.

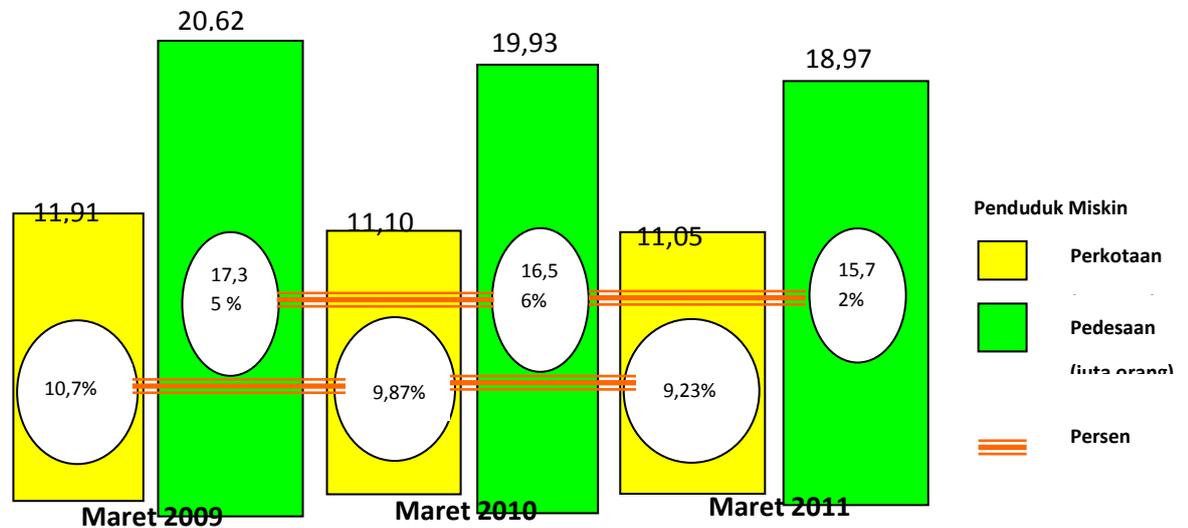
Terjadinya kekerasan, terorisme di Indonesia, unjuk rasa yang anarkis, dan tawuran masa, kelompok masyarakat ini disebabkan karena ketidakpuasan terhadap kondisi di lingkungan mereka terutama adanya jurang yang makin menganga antara kaya dan miskin, rendahnya kepedulian sosial bangsa, beberapa aparat penegak hukum selalu "bermain" didalamnya, standarisasi dibuat tidak jelas, korupsi yang semakin nyata merajalela dan sukar dibasmi, hilangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan dengan baik karena biaya pendidikan semakin tidak terjangkau, makin sering kita jumpai.

Pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 99 triliun untuk anggaran program pengentasan warga miskin dalam RAPBN tahun 2012 (*Kompas*, 5 November 2011, hal 19). Anggaran tersebut tersebar dalam berbagai program, seperti bantuan sosial (Jamkesmas), program khusus (Program keluarga Harapan) dan subsidi (Raskin). Jamkesmas meliputi 9.236 Puskesmas untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan 85% rumah sakit melayani pasien miskin peserta Jamkesmas. Target 1.616.000 PKH, subsidi pangan Rp.15,6 triliun sasaran 17,5 juta rumah tangga miskin dengan alokasi 15 kg/kepala keluarga selama 12 bulan. Kelemahan dari program pengentasan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga tidak memiliki strategi yang terintegrasi dan sasaran dari program dan target yang harus dicapai, sehingga program pengentasan kemiskinan ini hanya sebagai konsep anggaran yang terlaksana dengan capaian yang tidak menentu, korupsi pada program ini sangat tinggi karena sulit untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran karena sasaran penduduk yang tidak tepat, penduduk miskin tidak mengetahui adanya program ini karena minim sosialisasi dan penduduk yang buta huruf merupakan sasaran utama bagi koruptor dana ini.

Korupsi sengaja "dibiarkan" meraja-lela di pemerintahan, parlemen rakyat (DPR dan DPRD) serta di lembaga-lembaga negara. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang dilaporkan pemerintah merupakan laporan kinerja pemerintah sisi keuangan, yang dilaporkan unit kerja pemerintah menunjukkan banyak ketidakefisienan dan efektifitas, belum sesuai dengan tujuan *good governance*, birokrat yang korup disegala lapisan unit kerja. Masyarakat makin miskin biarpun mempunyai kekayaan bumi yang melimpah (contoh Papua) sehingga mereka merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2002-2010 dari total dana otonomi khusus Papua Rp.28,84 triliun dimana Rp.19,12 triliun (66,20%) hasilnya terdeteksi penyimpangan Rp.4.12 triliun meliputi Rp.28,94

milyar fiktif, kelebihan pembayaran proyek Rp.218,29 milyar, denda penyelesaian pekerjaan Rp. 17,22 milyar, pengadaan barang dan jasa Rp. 326,29 miliar (*sumber Kompas*, 4 November 2011, hal 46).

PERKEMBANGAN KEMISKINAN INDONESIA



Sumber : Badan Pusat Statistik

Disisi lain, perkembangan sejarah peradaban dunia Islam membangun ilmu pengetahuan (falsifikasi) yaitu ilmu kalam, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan , kemampuan dan teknologi umat Islam yang bersumber pada Al Qur'an. Untuk membangun pengetahuan Islam, para muslim harus menghilangkan mitos dan membangun semangat *scientific circle* (Noor Sa'adah, 2008, hal 143) yang selama ini membelenggu umat muslim dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, problema yang terjadi di Indonesia ini termasuk problem geopolitik, etika dan gender, serta ekonomi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dewasa ini tahap transformasi demokrasi sebagai nilai dan prinsip mengedepankan aspirasi, kesetaraan, keadilan dalam menyelesaikan perbedaan merupakan kebutuhan bangsa dan negara kita. Kucuran dana yang belum menetes rata sampai ke rakyat di daerah, dimana besarnya yang mengucur belum di imbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, hasil audit BPK memberikan opini *disclaimer* dari beberapa laporan keuangan daerah. Pemerintah mengalokasikan anggaran 20% untuk bidang pendidikan, tetapi realita masih banyak sarana-prasarana pendidikan

yang sudah tidak layak pakai, hal tersebut berpengaruh kepada banyak daerah yang mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah angka nasional (IPM Papua rata-rata di peringkat 30).

Kajian ini ingin mengaplikasikan metode teori dasar dari fenomena sosial pada pendidikan agama dan pendidikan sekuler, kemiskinan, tenaga kerja etika sosial dan peluang masa depan muslim di Indonesia. Tujuan yang diharapkan adalah untuk kajian tinjauan kritis terhadap literatur tentang tanggung jawab investasi sosial, baik sisi keuangan dan tujuan sosial, serta ingin mengetahui seberapa besar peranan kajian yang membandingkan pendidikan agama dan masa depan Islam di Indonesia.

2. TINJAUAN TEORI

Beberapa penelitian yang dilakukan peneliti luar negeri yang menyatakan pendidikan selalu menjadi medan pertempuran untuk ide-ide tradisional dan reformasi progresif (*Maria Jaschok, Hau Ming Vicky Chan, 2006, hal.1*), penyebab dan dampak nilai pemegang saham, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), eksposur risiko dan kinerja dana tanggung jawab sosial untuk setiap investasi perusahaan dan dana kompensasi adalah meningkatnya kesadaran investor untuk sosial, lingkungan, isu-isu tata kelola etis perusahaan (*Luc, Jenke, Chendi, 2008, hal.1*). Apakah pendidikan agama dengan menantang monopoli laki-laki atas pilihan perempuan, dan dalam cara yang sama, apakah ketidakhadiran mereka melemahkan kekuatan dan hak-hak perempuan? atau memang demikian betapa pentingnya peran pendidikan agama dalam membentuk hak-hak perempuan dan pilihannya, dibandingkan dengan pendidikan pemerintah yang wajib, di mana semua warga memiliki hak? (*Maria Jaschok, Hau Ming Vicky Chan, 2006, hal 5*),

Hingga saat ini, bangsa Indonesia yang merupakan salah satu bangsa yang besar diantara negara-negara yang ada di atas bumi ini, belum memiliki suatu bentuk/format yang pas mengenai gaya (*Style*) manajemennya. Jepang, Cina atau Amerika dan negara-negara Eropa, sudah menemukan bentuk gaya manajemen dan sudah diterapkan. Hal tersebut bukan berarti bahwa pengelolaan administrasi negara dan bisnis di Indonesia selama ini tidak memakai konsep manajemen. Para pimpinan administrasi negara dan pimpinan perusahaan kebanyakan masih mengadopsi bentuk manajemen Amerika, Jepang, Cina serta bentuk lainnya, atau bahkan ada yang memadukan berbagai bentuk gaya manajemen tersebut dalam menjalankan organisasinya. Sehingga dengan

demikian, gaya manajemen yang asli dan khas Indonesia belum kelihatan (*ES.Rini*, 2002, hal 1).

Sering kali ada pertanyaan yang mendasar dari para praktisi maupun dari para ilmuwan yang belum terjawab tentang bagaimana sebenarnya bentuk yang pas dari manajemen Indonesia ?. Seperti kita ketahui hingga sekarang memang belum ada bentuk dasar yang jelas tentang manajemen Indonesia, seperti manajer gaya Amerika ataupun gaya Jepang yang sudah menjadi baku (*Rita D*,2003,hal 1). Beberapa bentuk pengelolaan pemerintah yang sudah semua dilaksanakan kecuali untuk sosialis yang tidak diimplementasikan di Indonesia, semua belum menyentuh secara optimal rakyat miskin dan Islam sebagai mayoritas agama penduduk Indonesia. Sedangkan perkembangan Islam ke depan dari beberapa negara (*Mansoor Moaddel*, 2004, hal.1) adalah mengembangkan reformasi ke depan dan menghilangkan politik dalam Islam (negara Iran), modernisasi dan konservatisme (negara Jordania), menurunkan campur tangan pemerintah (negara Arab).

Etika bisnis global dikaitkan dengan budaya dari negara investor, melalui teori *Hofstede. G.*, tentang konsekuensi budaya : nilai perbandingan, perilaku, institusi, organisasi antar negara dan produk domestik bruto per capita mempunyai kaitan pengaruh dengan etika bisnis global (penelitian *George and Scots*, 2007) menggunakan survey di 44 negara dari data World Value Survey. Kajian gender politik Islam sulit dijabarkan secara detail selama ada diversity melalui perspektif tempat politik, pengalaman dan lokasi sosial (*Sarah C. White*, 2010, hal.1), konsep teori ini mendasari tentang gender di Islam yang merujuk pada Al Qur'an dan Hadis Nabi mengenai pengaturan muslim sebagai khalifah di dunia.

3. INTERPRETASI

a. Kemiskinan dan tanggungjawab pemerintah

Indonesia sebagai negara kepulauan, yang berbeda dengan negara lain di dunia, sehingga Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda pula dengan negara lain didunia. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar-kecil (baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 dihuni manusia) , luas wilayah Indonesia 5.193.250 km² , 70% wilayah lautan (3.635.000 km²). Masalah yang menyertai pembangunan ekonomi, tidak hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga perubahan struktur ekonomi,

dimana perubahan struktur ekonomi, segi akumulasi (kuantitatif dan kualitatif), segi alokasi (pola penggunaan), segi institusional (kelembagaan dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat miskin), segi distribusi (pola pembagian pendapatan nasional), permasalahan lain yang berkaitan dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun politik.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Prediksi Pertumbuhan Penduduk di 8 Provinsi Tertinggi dan 8 Propinsi Terendah Tahun 2000-2025 Dalam Jutaan Jiwa

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JAWA BARAT	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
JAWA TIMUR	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
JAWA TENGAH	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
SUMATERA UTARA	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
SULAWESI SELATAN	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
LAMPUNG	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
SULAWESI TENGAH	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
SULAWESI TENGGARA	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
SULAWESI UTARA	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
BENGKULU	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
M A L U K U KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
MALUKU UTARA	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
INDONESIA	205,132	219,204.7	233,477.4	247,572.4	261,005.0	273,218.7

Sumber BPS Indonesia 25-4-2011 diolah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi permasalahan besar dalam perkembangan kotanya. Fenomena urbanisasi yang terjadi di

kota-kota besar mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang kota, seperti fasilitas perumahan. Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang juga mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, serta merupakan pengejawantahan jati diri.

Kemiskinan, sebagai salah satu bentuk tantangan sosial bagi pemerintahan perkotaan dan pedesaan, adalah akibat dari kesenjangan sosial yang cukup lebar sehingga terjadilah urbanisasi, dan dampak dari urbanisasi adalah bertambahnya pengangguran daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena para urban kekota tidak berbekal pengetahuan dan kemampuan individu, sehingga dampak selanjutnya adalah peningkatan kejahatan di kota. Untuk daerah pedesaan telah ditinggalkan penduduk usia produktif ke kota akibat tidak terjadi keseimbangan pembangunan wilayah secara sektoral antara perkotaan dengan pedesaan.



Gambar 1 : potret kemiskinan wilayah perkotaan dan pedesaan



Gambar 2 : potret pembangunan di perkotaan

Kemiskinan di Indonesia masih terdapat lebih dari 100 juta orang keluarga miskin, dimana ukuran dari kemiskinan bila keluarga tersebut berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000/hari. Sedangkan menurut BPS dianggap miskin bila penghasilan kurang dari Rp.7.000/hari, dan indeks kemiskinan Indonesia 2,50%, sedangkan indeks keparahan kemiskinan Indonesia 0,68% (lihat tabel dibawah ini)

Perspektif makro-nasional kesetaraan gender dalam pekerjaan di negara Muslim, membahas dan membandingkan implikasi kelembagaan sekularisme dan hukum Islam untuk kesetaraan gender dalam pekerjaan di negara. Menggambarkan studi kasus yang mempengaruhi pilihan organisasi sektor publik dan swasta yang terlibat dalam mempromosikan dan melaksanakan kesetaraan gender, kesetaraan gender dalam arti bahwa sekularisme dan syariah sebagai agenda ideologi yang dominan saat ini untuk kesetaraan gender. Memang, sekularisme dan syariah merupakan pemaksaan wacana kesetaraan gender yang hanya lipstick layanan, memberikan secara parsial terhadap tuntutan asli untuk kesetaraan. Kebutuhan untuk menyelamatkan kesetaraan gender dari cengkeraman ideologi akan membawa proses asli kesempatan yang sama dan keadilan sosial untuk mencari kerja.

Tabel 2 : Jumlah Terbesar dan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di 7 Propinsi Maret 2011

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			% Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
Jawa Timur	1 768.23	3 587.98	5 356.21	9.87	18.19	14.23
Jawa Tengah	2 092.51	3 014.85	5 107.36	14.12	17.14	15.76
Jawa Barat	2 654.69	1 993.93	4 648.63	9.26	13.32	10.65
Sumatera Utara	691.13	790.18	1 481.31	10.75	11.89	11.33
Lampung	241.94	1 056.77	1 298.71	12.27	18.54	16.93
Sumatera Selatan	409.15	665.66	1 074.81	15.15	13.73	14.24
Papua	35.27	909.53	944.79	4.60	41.58	31.98
Indonesia	11 046.75	18 972.18	30 018.93	9.23	15.72	12.49

Tabel 3 : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di 5 Propinsi Terdalam menurut Propinsi,
Maret 2011

Provinsi	P1 (%)		
	Kota	Desa	K+D
Papua Barat	0,8	11,13	8,78
Papua	0,7	10,37	7,86
Nusa Tenggara Timur	2.27	4.67	4.20
Gorontalo	0.90	5.17	3.72
Nusa Tenggara Barat	4.58	2.80	3.54
Indonesia	1.52	2.63	2.08

Tabel 4 : Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di 5 Propinsi Terparah, Maret 2011

Provinsi	P2 (%)		
	Kota	Desa	K+D
Papua Barat	0.14	4,4	3,43
Papua	0.15	3,74	2,81
Maluku	0,55	2,13	1,54
Nusa Tenggara Timur	0,65	1.42	1.27
Gorontalo	0.18	1.43	1.00
Indonesia	0.39	0.70	0.55

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Pengangguran Terbuka*) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2007-2011

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2007 (Agst)	2008 (Agst)	2009 (Agst)	2010 (Agst)	2011 (Agst)
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	532 820	547 038	637 901	757 807	877.265
2	Sekolah Dasar	2 179 792	2 099 968	1 531 671	1 402 858	1.120.090
3	SLTP	2 264 198	1 973 986	1 770 823	1.661.449	1 890 755
4	SMTA (Umum dan Kejuruan)	4 070 553	3 812 522	3 879 471	3.344.315	3 074 946
5	Diploma I/II/III/Akademi	397 191	362 683	441 100	443.222	244 687
6	Universitas	566 588	598 318	701 651	710.128	492.343
	Total	10 011 142	9 394 515	8 962 617	8.319.779	7 700.086

Sumber : Badan Pusat Statistik

*) Mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tdk mungkin mendapatkan pekerjaan, sdh punya pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka di Indonesia masih terdapat 7.700.086 orang menganggur, yang perlu diperhatikan adalah pengangguran lulusan SLTA ke bawah dimana mereka mempunyai kesempatan mencari pekerjaan sempit, menciptakan lapangan kerja tidak memungkinkan. Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan kondisi ini melalui cara meningkatkan kemampuan mereka sampai mereka mampu mandiri dan mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dengan dana yang harus ditanggung pemerintah dan pada akhirnya diberikan modal dana untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sebaiknya kemampuan yang diberikan adalah kemampuan teknik bukan administratif. Untuk program diploma dan strata 1 mereka mempunyai kemampuan untuk bersaing dipasaran kerja, posisi persaingan sebaiknya tidak mempersyaratkan indek prestasi kumulatif sekolah agar mereka mempunyai kesempatan untuk bersaing dalam berebut tenaga kerja, pemerintah membuka training-training yang biayanya ditanggung pemerintah disertai dengan penciptaan produk yang laku di pasaran regional, nasional dan internasional.

b. Pertumbuhan ekonomi dan korupsi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 6,5 % hingga triwulan III tahun 2011 (*Kompas 8 November 2011*, hal 1) Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berkualitas dimana strategi atau kebijakan ekonomi Indonesia tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Pertumbuhan ini tidak sejalan dengan kualitas hidup masyarakat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2011 dari PBB telah merosot dari peringkat 108 dari 169 negara, menjadi 124 dari 189 negara (IPM tahun 2010,2011 untuk PBB (dunia) 0,679 %, 0,682 sedangkan IPM Indonesia tahun 2010,2011 adalah 0,613, 0,617). Aspek-aspek kualitas pertumbuhan ekonomi (1). Akses bagi anak perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, serta terhadap lapangan pekerjaan apabila mereka lulus nanti (2). Akses bagi kaum miskin di pedesaan terhadap pengobatan dasar ketika pergi ke klinik kesehatan di desa mereka (3).Kebersihan udara dan air serta perlindungan terhadap keaneka ragaman hayati (4). Martabat yang dapat dinikmati kaum miskin dan keamanan jiwa mereka (5). Partisipasi rakyat bersama para reformis dalam pemerintahan untuk mengimplementasikan program antikorupsi (6). Memerangi kepentingan (vested interests) segelintir elite ekonomi yang secara membabi buta mempengaruhi bahkan membeli kebijakan regulasi dan hukum negara.

Ketidak-efisiensi, menghamburkan anggaran adalah potret korupsi saat ini, aparat organisasi pemerintah (publik) tidak pernah ada rasa kepedulian untuk penyelamatan anggaran yang diterima dari pemerintah untuk aktivitas yang menambah nilai dan sadar bahwa anggaran yang diterima itu adalah sebagian besar amanah dari uang rakyat miskin. Mentalitas aparat yang korup tidak memperdulikan bahwa kesejahteraan rakyat miskin adalah yang paling utama dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia miskin merupakan fokus untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kemandirian bangsa terutama untuk teknologi informasi harus memperoleh prioritas pada masyarakat secara umum dan fokus masyarakat miskin putus sekolah usia produktif. Korupsi yang ada di Indonesia masih diperingkat 110 dunia, artinya bahwa negara Indonesia masih sangat korup, kalau dibandingkan dengan negara Australia, Mexico, New Zealand, Singapore, Denmark. Para wakil pemerintahan, wakil rakyat hanya berkutat dengan masalah partai dan masalah pembelaan kepentingan partai masing-masing, kalau kita lihat bahwa kedua wakil rakyat tidak pernah serius menangani masalah bangsa (perbatasan, kesejahteraan, pendidikan). Korupsi itu tidak bisa diberantas tuntas karena orang korupsi itu sangat rapi dalam mempertanggungjawabkan laporan yang dibuat, apalagi uang suap yang menyangkut masalah regulasi, sukar dibuktikan tetapi dapat dibaca oleh masyarakat dan masyarakat takut untuk melaporkan karena yang menerima suap tidak mau tanda tangan dengan bukti penerimaan.

c. Kesetaraan gender dan peluang kerja

Pembukaan tempat-tempat pelatihan di setiap daerah dan kota agar penduduk yang putus sekolah maupun pengangguran dapat secara bertahap ditampung ditempat tersebut untuk diberi ketrampilan, bukan para trainer yang dididik untuk memberikan training kepada masyarakat hal ini tidak efektif dan tidak nampak membawa hasil kepada masyarakat secara umum, sebenarnya pusat-pusat balai pelatihan yang ada mempunyai idel aktivitas selama ini, maka pemerintah dapat menggunakan fasilitas dibalai latihan untuk menampung masyarakat secara bergelombang mendapat pelatihan dan bimbingan dengan baik. Pesantren-pesantren modern sebenarnya sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan santri yang ada di pesantren tersebut. Dalam pesantren modern kebanyakan adalah anak-anak dari keluarga mampu, sedangkan untuk anak orang miskin tidak mungkin dapat mengenyam pendidikan dalam pesantren moderen, oleh sebab itu diperlukan campur tangan pemerintah. Para pakar yang menguasai teknologi informasi dan menguasai pembuatan bahan teknologi informasi

seharusnya diperhatikan dan diberi dana untuk mengembangkan keahliannya dibidang tersebut dan nantinya dapat menciptakan lapangan kerja dan menampung banyak tenaga kerja, dan pemerintah dapat memasarkan hasil produknya ke negara lain, sehingga negara kita bukan tempat rongsokan barang-barang Jepang, Korea, Taiwan , China, Eropa dan Amerika Serikat.

Praktik-praktik dan kebijakan untuk kesetaraan gender (*Jawad Syed at all, 2009*) di negara ini tetap terjebak dalam perdebatan sekularisme vs religiusitas, yang membajak perhatian utama dari kesetaraan gender. Bahwa kesetaraan gender adalah wacana utama harus difokuskan dan dikendalikan untuk menghilangkan penyimpangan realisasi yang merugikan tujuan dari kesetaraan gender. Merupakan kebutuhan kekuatan ideologis moderen negara yang masih ada dengan pertimbangan etika kesempatan yang sama dan keadilan sosial untuk mencapai kesetaraan gender dalam pekerjaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penekanannya adalah pada perang ideologi sekuler terhadap nilai-nilai agama (misalnya larangan jilbab) sementara Islam difokuskan pada membatasi mobilitas negatip dalam domain kehidupan pribadi atau keluarga (penekanan misalnya pada ajaran kekerasan).

Kita lihat Islam di negara-negara lain yang menjadi kelompok minoritas, di negara China kaum muslim di sana dalam hal pendidikan, pemerintahan China selalu ikut campur, di bagian negara berpenduduk muslim. Populasi Muslim di China diperkirakan total 25 juta orang, terdiri dari 10 minoritas, baik yang tinggal dilingkungan mayoritas penduduk Muslim, dan juga tersebar luas, hampir tidak dapat dibedakan dengan penduduk han China (*Dillon 1995, Gladney 1991, 2004, Israeli 1980*). Mereka berbeda satu dengan lainnya melalui bahasa, praktek budaya, keadaan ekonomi dan lokasi geo politik, tetapi masyarakat yang beragam mempunyai satu karakteristik penting : pendidikan agama Islam sebagai sebuah pertanda identitas kaum Muslimin di daerah non-Muslim.

Pentingnya perjuangan Wanita Muslim di seluruh dunia untuk memberikan pendidikan tinggi anak perempuan. Pendidikan agama merupakan satu-satunya cara untuk menghancurkan monopoli kaum pria atas intrepretasi dalam hukum Islam dan praktik Islam (*Aihwa Ong,2006*). Perempuan Uyghur di propinsi Xinjiang dan bagian propinsi Gansu dikecualikan dalam pendidikan dan doa bersama dalam memperoleh pendidikan, dimana laki-laki memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang Islam, dan pemimpin mereka mengintrepretasikan peran gender melalui sudut pandang patrialisasi, melegitimasi dimana Agrawal (1994) menyebutnya “ tradisi yang tak boleh

dibantah” bersumber Al Qur’an dan Hadis. Lebih dari 300 tahun masjid wanita (Qingzhen nu”si) di bawah kepemimpinan seorang wanita Ahong, mendukung pendidikan untuk anak perempuan dan wanita Muslim, menawarkan pengendalian yang lebih pengendalian pendidikan untuk anak dan perempuan Muslim di China, para wanita diajarkan pengetahuan , bahasa Persia, yang lebih luas, bahasa Arab ditambahkan dalam kurikulum, para wanita menerima intruksi sholat dan petunjuk pelaksanaan untuk praktek Muslim di rumah.

Di Unisoviet, setelah terjadi reformasi di negara tersebut dimana masyarakat muslim di negara tersebut sebagai warga negara minoritas, telah mendapatkan kebebasan dengan memberikan otonomi daerah, dimana otonomi diberikan kepada 5 daerah otonomi, 30 prefektur, 117 kabupaten. Ini menunjukkan bahwa di Unisoviet telah merubah sudut pandang negara semua adalah yang mengatur negara (komunis), kemudian diserahkan kepada daerah setempat untuk mengatur sendiri (otonomi). Memberikan kesamaan hak dan kewajiban kepada semua warga negaranya, termasuk pendidikan, peluang kerja dan kesamaan gender. Sedangkan wanita Islam di negara Swedia mempersoalkan masalah konsep feminis di Islam yang diartikan secara mutlak adalah taat dan harus menurut suami(laki-laki) sebagai bawahan (*Anna Mansson McGinty,2007*), dalam artikel ini disampaikan bahwa konsep feminis di Islam untuk kaum wanita adalah sudut pandang feminis diimplementasikan melalui keterlibatan dalam berbagai organisasi Muslim dan kegiatan, lokal maupun global. Dengan demikian, feminisme Islam bukan hanya sebuah gerakan keagamaan, tetapi paradigma dengan ide politik dan sosial.

Di Indonesia, esensi keragaman gender yaitu pembentukan struktur gender yang egaliter dan rutinitas di tingkat nasional makro dan meso-level organisasi, masih sangat diabaikan. Prinsip-prinsip kesempatan yang sama dan keadilan sosial di sejumlah tempat termasuk menghormati nilai-nilai 'non-mainstream' dan ideologi, prinsip-prinsip egaliter, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan inklusi, dapat diadopsi sebagai dasar kesetaraan gender dalam pekerjaan karena mereka melampaui batas-batas agama, dan nasional, oleh sebab itu bahwa kesetaraan gender di Indonesia (dan tempat lain) akan tetap realistis dengan penanganan secara simultan pada tingkat nasional makro, meso-dan organisasi micro individual independen dari setiap agenda politik atau ideologis.

Warga negara Indonesia adalah mayoritas Muslim tetapi seperti minoritas dalam aktivitas ekonomi, pengolahan sumber daya alam dan buruh di negaranya sendiri. Banyak perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya alam, banyak perusahaan mutli nasional dari negara asing dengan pembatasan yang berarti dan dikuasi non muslim.

Kemampuan untuk menjadi bangsa mandiri sangat rendah, pemimpin yang muslim pun tidak banyak memperhatikan aktivitasnya terhadap kemaslahatan orang banyak terutama masyarakat miskin. Media televisi dan hiburan yang menjadi tempat informasi tidak banyak manfaatnya bagi generasi muda dan banyak madorotnya, banyak tayangan-tayangan negatip yang tanpa sensor sudah meracuni anak bangsa, kekerasan, perdebatan kaum elite politik yang tidak punya nilai tambah, para pakar yang pandai bicara rendah untuk bertidak, pendidikan yang tidak mempunyai tujuan untuk kemandirian bangsa, perempuan yang sudah terlalu modern sehingga melupakan kewajiban untuk pendidikan anak bangsa.

d. Tanggung Jawab Sosial Investasi (*Social Responsibility Investmen*)

Tanggung jawab sosial investasi telah mengalami pertumbuhan pesat di seluruh dunia, yang mencerminkan peningkatan kesadaran sosial investor terhadap tanggung jawab sosial, dan lingkungan pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu seperti pemanasan global, Protokol Kyoto, tata kelola perusahaan, dan komunitas investasi telah mendapat perhatian yang signifikan oleh pemerintah dan investor di seluruh dunia. Selain itu, pemerintah di negara-negara Barat telah mengambil inisiatif regulasi untuk merangsang lebih banyak tanggung jawab sosial investasi perusahaan. Mengingat perkembangan kesadaran sosial investor dan peraturan lingkungan yang lebih positif, kami berharap bahwa tanggung jawab sosial investasi akan melanjutkan pertumbuhan perusahaan dan kepentingan relatif nilai kekayaan perusahaan.

Kesimpulan utama dari survei tanggung jawab sosial investasi perusahaan adalah bahwa sementara beberapa penelitian telah dilaksanakan mengenai tanggung jawab sosial investasi, ada masalah besar masih banyak dan teka-teki yang masih harus diselesaikan oleh negutama mengenai analisa dampak lingkungan yang juga menyangkut dan terkait dengan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan hidup masyarakat. Munculnya tanggung jawab sosial investasi perusahaan, dikombinasikan dengan perbedaan perilaku antara tanggung jawab sosial investasi dan investor konvensional, menimbulkan pertanyaan menarik untuk penelitian tentang keuangan perusahaan, nilai aset, dan intermediasi keuangan.

Pada tingkat perusahaan, pertanyaan apakah biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan meningkatkan harga saham perusahaan di-pasar modal masih merupakan salah satu fenomena. Meskipun CSR ditemukan terkait dengan nilai yang lebih tinggi pemegang saham, tidak ada bukti meyakinkan pada arah kausalitas

(Luck, Jenke, Chendi, 2008). Juga, akan menjadi daerah yang subur untuk penelitian empiris yang menyelidiki bagaimana CSR memengaruhi biaya modal perusahaan dan keputusan investasi perusahaan.

Dalam rangka melaksanakan pengendalian pencemaran air, Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan antara lain UU. No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup; UU. No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan PP. No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta lainnya. Berbagai upaya pengendalian pencemaran air yang telah dilakukan melalui berbagai kebijakan diantaranya melalui pendekatan kelembagaan, hukum, teknis dan program khusus. Pendekatan kelembagaan dilakukan dengan membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), dan Dinas-dinas Lingkungan Hidup Daerah yang saat ini menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda).

Berbagai program khusus dari tahun 1980-an sampai saat ini telah dilaksanakan yaitu diantaranya Program Kali Bersih (Prokasih), Surat Pernyataan Kali Bersih (SuperKasih) dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Hal tersebut telah dilaksanakan di berbagai daerah yang berupa studi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air terutama pada sungai-sungai penting yang mempunyai fungsi pemanfaatan yang sangat tinggi. Balai Lingkungan Keairan, Pusat Litbang SDA, melalui pendekatan teknis sejak tahun 1980 telah berkiprah dalam upaya pengendalian pencemaran air dalam rangka mendukung kebijakan MenLH dan Program TKP2 (Tim Koordinasi Pengendalian Pencemaran Provinsi). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, upaya konservasi sumber daya air khususnya terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang juga dimuat dalam PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa upaya pengendalian pencemaran air yaitu mengendalikan kualitas air masukan ke badan air penampung yang dalam hal ini sungai, danau dan waduk serta air tanah akifer. Balai Lingkungan Keairan, Puslitbang Sumber Daya Air (SDA) yang berada dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjaan Umum, sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pengendalian pencemaran air yaitu melakukan penelitian dan pengembangan yang dimulai dari studi teknologi pengendalian pencemaran air (PPA) yang kemudian melaksanakan pembangunan pilot plant instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagai uji coba dari berbagai kriteria desain teknologi PPA sebagai hasil kajian dari studi-studi terdahulu. Berdasarkan hasil pengalaman dari

berbagai kegiatan studi dan pengamatan berbagai pilot plant, dan juga Balai Lingkungan Keairan sering melakukan rekomendasi teknis teknologi PPA yang berupa IPAL, yang selanjutnya mengimplementasikan sistem IPAL Terpadu di IPAL-Cisirung. Untuk jenis teknologi yang lain, pada saat ini masih melakukan litbang mengenai IPAL dengan menggunakan Ekoteknologi (*wetland*), yang diharapkan sebagai teknologi PPA alternatif dengan biaya OP yang murah. Studi pengendalian pencemaran air. Pada periode tahun 1980-2005, (*Pusat Litbang SDA, 2006*) pemerintah merekomendasikan langkah-langkah diantaranya adalah sbb. :

1. Prinsip dasar pengendalian pencemaran air adalah melakukan reduksi kadar atau beban pencemaran sampai dengan tingkat baku mutu limbah cair (*effluent standard*) yang ditetapkan, atau diversifikasi kegiatan dengan menggunakan peralatan yang menghasilkan limbah cair sedikit, ataupun menggunakan sistem industri bersih, mengurangi perluasan atau peningkatan sistem produksi industri, revitalisasi infrastruktur pengendalian pencemaran air yang telah ada, pengetatan sistem perizinan pembuangan limbah,
2. Dalam rangka memenuhi baku mutu air (*stream standard*) dari sungai sebagai badan air penampung, perlu memperhatikan daya tampung beban pencemarannya pada ruas sungai tersebut dengan menyesuaikan titik pembuangan yang mempunyai kemampuan *self purification* yang tinggi atau relokasi titik buang sumber pencemarannya ataupun sumber pencemarnya terkait dengan sistem perijinan yang berlaku,
3. Untuk menunjang pelaksanaan pengendalian pencemaran, perlu dilakukan penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan upaya konservasi kawasan, review penataan ruang kawasan ataupun peruntukan lokasi, dan sosialisasi program serta sistem pengawasannya,

Realisasinya bahwa pengendalian pencemaran air tetap tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah secara optimal (baik pemerintah pusat maupun daerah). Pencemaran air sungai yang masih mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya masih terdapat diseluruh air sungai yang melewati daerah industri. Tanggung jawab sosial perusahaan yang melewati sungai sangat rendah, mereka memandang bahwa lingkungan hidup yang tercemari bukan wilayah yang ada di negaranya, mereka dapat melakukan apapun terhadap aparat yang terkait dengan amdal dengan berbagai bentuk gratifikasi, aparat tidak berani menindak karena terkait dengan tenaga kerja dan pengangguran.

Kesengajaan – kesengajaan tersebut sampai saat ini masih dilakukan perusahaan-perusahaan yang melewati sungai (contoh ; Kali Brantas Surabaya) yang terbukti bahwa pencemaran kali cukup tinggi, ditandai dengan hilangnya jenis ikan tertentu yang ada di sungai, ikan jenis kelamin laki berubah jadi jenis perempuan (*Kompas`2011*)., ditutupnya operasional pabrik gula Gempol Kerep karena membuang limbah ke kali Brantas tanpa diolah terlebih dahulu, dan sebagainya.

Pertanyaan yang mungkin jadi renungan : bagaimana kualitas kesehatan generasi muda di masa depan dengan kualitas sumber daya air yang tercemar, bagaimana nasib bangsa ini ? Harapan masyarakat terhadap pemerintah , dimana pemerintah merupakan pusat segala penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, untuk secara real berani menindak pengusaha nakal yang mencemari lingkungan. Dalam hal ini pemerintah harus siap menggantikan posisi perusahaan yang akan hengkang dari negara Indonesia.

4. SIMPULAN

Pemerintah harus menyeimbangkan regulasi, gender, kesetaraan dan keadilan kepada masyarakat terhadap kesempatan dan peluang untuk mengenyam pendidikan, pemakaian sarana prasarana pemerintah dengan gratis, training yang diberikan pemerintah dengan bebas biaya, biaya pendidikan yang relatif rendah dan peduli terhadap kemiskinan bangsa, membasmi koruptor sampai keakarnya artinya koruptor harus mengembalikan dana yang dipakai sampai koruptor itu miskin, hukum masalah korupsi yang cenderung dikaitkan dengan HAM segera ditinjau ulang, atau negara menganut hukum Islam yang murni dan benar untuk para koruptor karena negara kita mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Kesetaraan dan keadilan juga harus dilaksanakan secara fokus dan dikendalikan secara adil oleh pemerintah, masyarakat butuh realitas, bukan komentar dan analisa para pakar yang ada di media masa maupun televisi ataupun pejabat yang terkait. Kekerasan, terorisme, kesadisan dan tawuran masa menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang mulai dikatakan sebagai negara yang tidak aman bagi warga negara, turis mancanegara, hal ini dampak dari keadilan, kesetaraan dan perilaku pemerintah dan swasta yang tidak peduli terhadap kesetaraan, keadilan dan kerusakan lingkungan. Kesenjangan sosial yang semakin menganga dan semakin lebar jaraknya juga memicu kondisi tersebut di atas. Peningkatan kemampuan masyarakat harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan membuat training praktis yang ditujukan untuk produktivitas dengan kualitas tinggi yang mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional.

Pemimpin pemerintah harus hidup sederhana yang mencontoh terhadap kehidupan Nabi Muhammad SAW dan kholifah Umar bin Khatab yang mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya dan tidak mengutamakan kesejahteraan keluarga maupun kelompoknya.

Belajar dari negara-negara lain (China, Jepang, Korea, Taiwan dll) yang mengutamakan kebersamaan dan peningkatan kempotensi masyarakatnya, agar tetap mampu bersaing dengan bangsa lain. Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar merupakan pasar yang perlu dikelola untuk hasil produk bangsa sendiri. Sumber penderitaan masyarakat adalah korupsi yang merajalela di Indonesia.

Membangun kejujuran dengan implementasi ketat yang dimulai dari para pimpinan birokrasi pusat dan daerah, para pendidik (guru dan dosen), para auditor pemerintah pusat dan daerah, para pegawai departemen keuangan, dan para aparat penegak hukum, dengan berdasar pula pada pedoman keyakinan masing-masing.

Daftar Pustaka :

Anna Mansson McGinty,2007, "*Formation of alternative femininities through Islam: Feminist approaches among Muslim converts in Sweden*" Elsevier

George R. Franke , S. Scott Nadler,2010, "*Culture, economic development, and national ethical attitudes* ", Elsevier.

Jawad Syed at all, 2009, *Rescuing gender equality from the false dichotomies of secularism versus shariah in Muslim majority countries*, Elsevier.

Lance Daniel Laird, Justine de Marrais, Linda L. Barnes,2007, "*Portraying Islam and Muslims in MEDLINE: A content analysis*, Elsevier.

Luc Renneboog , Jenke Ter Horst , Chendi Zhang, "*Socially responsible investments: Institutional aspects, performance, and investor behavior* " , January 2008 Elsevier .

Mansoor Moaddel "*The future of Islam after 9/11*",2004, USA , Elsevier .

Maria Jaschok a, Hau Ming Vicky Chan, 2009, "*Education, gender and Islam in China: The place of religious education in challenging and sustaining 'undisputed traditions' among Chinese Muslim women*" Elsevier.

Noor Sa'adah,2008, "*Membangun Peradaban Islam* " *Belajar dari Sejarah Barat* ", jurnal Abbin volume 2 tahun 2008

Sumber : Pusat penelitian dan pembangunan Sumber Daya Alam , tahun 2006

Sumber Harian Kompas, 4 November 2011, hal 46

Sumber Harian Kompas, 5 November 2011, hal 19.

Sumber Harian Kompas, 5 November 2011, hal 19.

Wikipedia, "Corruption Perception Index", 24 October 2011